

## ANTARA ANGKA DAN REALITAS: MEMAHAMI DAN MENGANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM MENDAPATAN DAN BELANJA PUBLIK

Amelia Finda Azzahra<sup>1</sup>, Elsa Nurhaliza<sup>2</sup>, Gilang Satria Al Fathin<sup>3</sup>, Dimas Raka  
Fatchurisna'in<sup>4</sup>, Herlina Manurung<sup>5</sup>  
Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar<sup>12345</sup>

Corresponding Author: [findaamelia212@gmail.com](mailto:findaamelia212@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research provides an analysis of the financial performance of the Magelang Regency Government in the 2020-2022 period through evaluating effectiveness and efficiency ratios. The research findings show variations in the effectiveness and efficiency ratio over the period. In 2020, the effectiveness ratio reached 124.21%, while the efficiency ratio reached 89.61%. However, in 2021, the efficiency ratio decreased to 103.71% and the efficiency ratio decreased to 87.89%. However, in 2021, there was a decrease in the effectiveness ratio to 103.71%, although the efficiency ratio remained stable at 89.61%. Meanwhile in 2022, the effectiveness ratio will increase to 107.40%, with an efficiency ratio of 89.72%. In addition, this research reveals an increase in the Decentralization Degree Ratio from 13.85% in 2020 to 16.91% in 2022, reflecting the Magelang Regency Government's efforts to increase Regional Original Income (PAD) as part of total regional income. Although there is still dependence on external financial assistance, achieving the Consultative criteria in 2022 shows positive steps towards increasing regional financial independence. This research provides an overview of Magelang Regency's progress in reducing dependence on external sources of income. It is hoped that the results of this research will provide valuable insight for the Magelang Regency Government in planning future finances, by considering effectiveness and efficiency ratios as a guide for better decision making.*

**Keywords:** *Financial Performance, Financial Ratios, Original Regional Income (PAD).*

### ABSTRAK

Penelitian ini memberikan analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang periode 2020-2022 melalui evaluasi rasio efektivitas dan efisiensi. Temuan penelitian menunjukkan variasi rasio efektivitas dan efisiensi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 124,21%, sedangkan rasio efisiensi mencapai 89,61%. Namun pada tahun 2021, rasio efisiensi menurun menjadi 103,71% dan rasio efisiensi menurun menjadi 87,89%. Namun

pada tahun 2021 terjadi penurunan rasio efektivitas menjadi 103,71%, meskipun rasio efisiensi masih stabil di angka 89,61%. Sedangkan pada tahun 2022, rasio efektivitas meningkat menjadi 107,40%, dengan rasio efisiensi sebesar 89,72%. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan adanya peningkatan Rasio Derajat Desentralisasi dari 13,85% pada tahun 2020 menjadi 16,91% pada tahun 2022 mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari total pendapatan daerah. Meski masih terdapat ketergantungan terhadap bantuan keuangan eksternal, namun pencapaian kriteria Konsultatif pada tahun 2022 menunjukkan langkah positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini memberikan gambaran kemajuan Kabupaten Magelang dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merencanakan keuangan masa depan, dengan mempertimbangkan rasio efektivitas dan efisiensi sebagai pedoman pengambilan keputusan yang lebih baik.

**Kata Kunci** : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upayanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan pengalokasian anggaran yang efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai kinerja yang optimal. Sebagai representasi kuantitatif dari tujuan, strategi, tugas, dan fungsi pemerintahan nasional, APBD harus disesuaikan dengan struktur yang memperhatikan kebutuhan, potensi, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat umum untuk jangka waktu tertentu. pertanyaan . Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sesuai dengan (BPK RI, 2005)

Transfer dan Pertanggungjawaban Mata Uang Dalam Negeri memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas transfer mata uang dalam negeri. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan karya keseimbangan yang transparan, efisien, dan efektif, serta bertanggung jawab, dan mengutamakan prinsip keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan daerah harus dipertamakkan dalam perencanaan anggaran, dan harus dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan, serta harus dapat dipertanggungjawabkan, tetapi bebas pada "pesanan proyek tertentu" (BPK RI, 2000) .

Ada tiga tujuan utama partisipasi angkatan kerja sektor publik. Pertama,

membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya dengan memberikan jam kerja yang dapat mengarahkan perhatian pada maksud dan tujuan unit kerja tersebut, sehingga meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, meminimalkan fluktuasi sehari-hari dan proses pengembangan keputusan. Ketiga, mengembangkan kebijakan publik transnasional dan meningkatkan komunikasi antar organisasi (Mardiasmo, 2004).

Hingga saat ini data absolut pada APBD belum tersedia seutuhnya tentang informasi mengenai kinerja keuangan. Dalam otonomi daerah skema desentralisasi fiskal yang digunakan kurang efektif dalam menampilkan hasil otonomi daerah dan tidak terlalu efektif dalam menentukan sumber pendapatan daerah, (Fitriani, N., L. & Dwirandra, 2014).

Dalam rangka menyelenggarakan pengaturan dan pengaturan keuangan daerah, pemerintah daerah bersatu padu dalam upayanya. Kinerja keuangan digambarkan sebagai hasil yang mengurangi risiko. Kinerja keuangan terhadap kegiatan yang ditujuk dengan menggunakan indikator, sebagian besar indikator keuangan. Tujuan analisis angkatan kerja keuangan adalah untuk mengevaluasi partisipasi angkatan kerja dari periode sebelumnya dengan menggunakan beberapa analisis keuangan yang berbeda. Salah satu metode untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah adalah dengan menganalisis rasio nilai keuangan (Halim, 2008).

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum LRA disampaikan, pelapor harus merinci semua data anggaran dan realisasi anggaran yang relevan dalam laporan tersebut. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana alokasi sumber daya ekonomi dan keuangan telah dilakukan serta memungkinkan evaluasi terhadap keputusan yang diambil oleh entitas pelapor.

Saat ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang melihat terjadi penurunan tajam pada bidang keuangan daerah, sebagian besar terkait dengan anggaran yang disebutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyatakan bahwa pendapatan daerah tidak cukup untuk menutupi seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan. Munculnya sisa anggaran ini mengejutkan, mengingat pemerintah daerah sebelumnya telah mengakupi. Realisasi pendapatan yang lebih tinggi mungkin lebih tinggi daripada pengeluaran yang dialokasikan, yang ditambahkan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara estimasi yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran dan ekspektasi keuangan yang diubah sebelumnya.

Berikut adalah data APBD Kabupaten Magelang 2020-2022.

**Tabel 1 APBD Kabupaten Magelang tahun 2020-2022**

Kabupaten Magelang	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
	2020	2.359.822.006.628	2.571.445.204.287
	2021	2.473.803.009.514	2.745.790.865.616
	2022	2.567.090.403.879	2.864.668.786.188

Sumber: (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

**Tabel 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang 2020-2022**

Kabupaten Magelang	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
	2020	2.380.457.680.604	2.304.375.917.161
	2021	2.469.754.315.099	2.413.163.788.892
	2022	2.558.024.177.090	2.570.326.001.677

Sumber: (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Dari tabel yang telah disajikan, terlihat adanya perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya selama periode 2020-2022. Kenaikan terus menerus terjadi dalam realisasi pendapatan dan belanja pada tahun-tahun tersebut. Perubahan ini harus diimplementasikan sepenuhnya sesuai dengan kondisi keuangan dan evaluasinya. Keadaan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan finansial yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

Berdasarkan keterangan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada evaluasi kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Magelang menggunakan rasio keuangan, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi derajat desentralisasi, dan rasio kemandirian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana program mencapai hasil yang diinginkan, sementara rasio efisiensi mengukur penggunaan sumber daya dengan biaya minimal. Derajat desentralisasi mencerminkan tingkat otonomi keuangan daerah, dan rasio kemandirian mengukur seberapa besar daerah dapat mengandalkan pendapatan lokal tanpa bergantung terlalu banyak pada dana eksternal. Analisis rasio ini membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih cerdas dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan publik..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisisnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Magelang selama periode 2020-2022 merupakan data sekunder yang akan digunakan. Laporan ini memberikan gambaran rinci mengenai keadaan keuangan pemerintah daerah, mulai dari pendapatan, belanja, transfer, hingga pembiayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap aspek keuangan pemerintah daerah tersebut. BPPKAD menjadi sumber data yang menyediakan informasi komprehensif mengenai realisasi anggaran dan kebijakan keuangan yang diterapkan selama periode tersebut.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara mendalam, menggali aspek-aspek kualitatif dalam LRA. Informasi tersebut mencakup alokasi dana, keputusan kebijakan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengurai konteks dan kompleksitas di balik angka-angka dalam LRA, dan faktor politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk realitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas adalah perbedaan antara PAD yang didapat oleh pemerintah daerah dengan jumlah pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh berdasarkan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa lama pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya ekonomi lokal untuk mendukung pembangunan dan pembangunan publik. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan lokal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kategori skala rasio efektifitas:

- > 100%, artinya sangat efektif
- 100%, artinya efektif
- 90% - 99%, artinya cukup efektif
- 75% - 89%, artinya kurang efektif
- < 75%, artinya tidak efektif

*Sumber: Mahmudi (2021) dalam (Jati & Pangestu, 2021)*

### 2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mencerminkan sejauh mana pengeluaran pemerintah daerah cocok

dengan pendapatan yang diterima. Apabila rasio ini berada di bawah 100%, menunjukkan efisiensi dalam pengeluaran. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kategori skala rasio efisiensi:

- > 100%, artinya tidak efisien
- 90% - 100%, artinya kurang efisien
- 80% - 90%, artinya cukup efisien
- 60% - 80%, artinya efisien
- < 60%, artinya sangat efisien

*Sumber: Mahmudi (2021) dalam (Jati & Pangestu, 2021)*

### 3. Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi merupakan rasio yang mengukur sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 100\%$$

Kategori skala derajat desentralisasi:

- 0% - 10%, artinya sangat kurang
- 10,01% - 20%, artinya kurang
- 20,01% - 30%, artinya sedang
- 30,01% - 40%, artinya cukup
- 40,01% - 50%, artinya baik
- > 50%, artinya sangat baik

*Sumber: Tim Litbang Depdagri oleh Fisipol UGM, 1991 dalam (Jati & Pangestu, 2021)*

### 4. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan transfer daerah dengan perkiraan penerimaan transaksi awal. Selanjutnya, tingkat pengembalian disesuaikan berdasarkan pola hubungan yang dihasilkan dan tingkat kemampuan keuangan (Azhari, 2017).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kategori skala rasio kemandirian:

- 0% - 25%, artinya rendah sekali dengan pola hubungan instuktif
- 25% - 50%, artinya rendah dengan pola hubungan konsultif
- 50% - 75%, artinya sedang dengan pola hubungan partisipatif
- 75% - 100%, artinya tinggi dengan pola hubungan delegatif

*Sumber: Halim 2021 dalam (Patarai, 2019)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat rincian tentang pelaporan pelaporan anggaran, termasuk realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Tanpa menilai kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan. Informasi yang terkandung dalam laporan ini membantu pengguna mengevaluasi distribusi biaya, kewajiban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait realisasi total aset. Pada gilirannya, ini membantu pengguna merumuskan keputusan yang tepat.

APBD bagian pendapatan merupakan kumpulan setiap uang yang diterima melalui rekening kas umum disuatu daerah dan meningkatkan nilai agunan. Ini berarti daerah tersebut diakui sebagai entitas dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pengembalian dana kepada daerah (Halim, 2004). Dalam APBD, pendapatan didefinisikan sebagai berikut: 1) PAD, 2) Pendapatan lain-lain daerah yang sah, 3) Dana perimbangan. Ada empat kategori belanja menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: 1) Administrasi Umum; 2) Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; 3) Modal; dan 4) Belanja Transfer.

**Tabel 3 LRA Kabupaten Magelang 2020**

Uraian	2020	
	Realisasi	Anggaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	329.769.193.224	265.502.524.500
Dana Perimbangan	1.390.679.533.778	1.413.496.832.128
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	660.008.953.602	680.822.650.000
Jumlah Pendapatan	2.380.457.680.604	2.359.822.006.628
Jumlah Belanja	2.304.375.917.161	2.571.445.204.287
Surplus/Defisit	76.081.763.443	- 211.623.197.659
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	218.814.092.659	218.814.092.659
Pengeluaran Pembiayaan	7.204.000.000	7.204.000.000
Pembiayaan Netto	211.610.092.659	211.610.092.659
SILPA	287.691.856.102	-

Sumber: (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

SILPA mencapai Rp287.691.856.102, dan berasal dari pendapatan asli daerah yang terealisasi melebihi rencana sebesar 124,21%, dan pengeluaran pembiayaan yang sesuai dengan perencanaan mencapai 100%. Meskipun pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp211.623.197.659, tetapi realisasi mencapai Rp211.610.092.659 atau 99,99

**Tabel 4 LRA Kabupaten Magelang 2021**

Uraian	2021	
	Realisasi	Anggaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	375.378.465.373	361.937.105.587
Dana Perimbangan	1.406.424.109.695	1.421.410.311.349
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	687.951.740.031	690.455.592.578
Jumlah Pendapatan	2.469.754.315.099	2.473.803.009.514
Jumlah Belanja	2.413.163.788.892	2.745.790.865.616
Surplus/Defisit	56.590.526.207	- 271.987.856.102
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	287.691.856.102	287.691.856.102
Pengeluaran Pembiayaan	15.704.000.000	15.704.000.000
Pembiayaan Netto	271.987.856.102	271.987.856.102
SILPA	328.578.382.309	-

Sumber: (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

SILPA mencapai Rp328.578.382.309, yang diperoleh dari pendapatan asli daerah yang terealisasi melebihi rencana sebesar 103,71%, serta pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto yang sesuai dengan perencanaan mencapai 100%. Meskipun pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp271.987.856.102, realisasi mencapai Rp271.987.856.102 atau 100,00%.

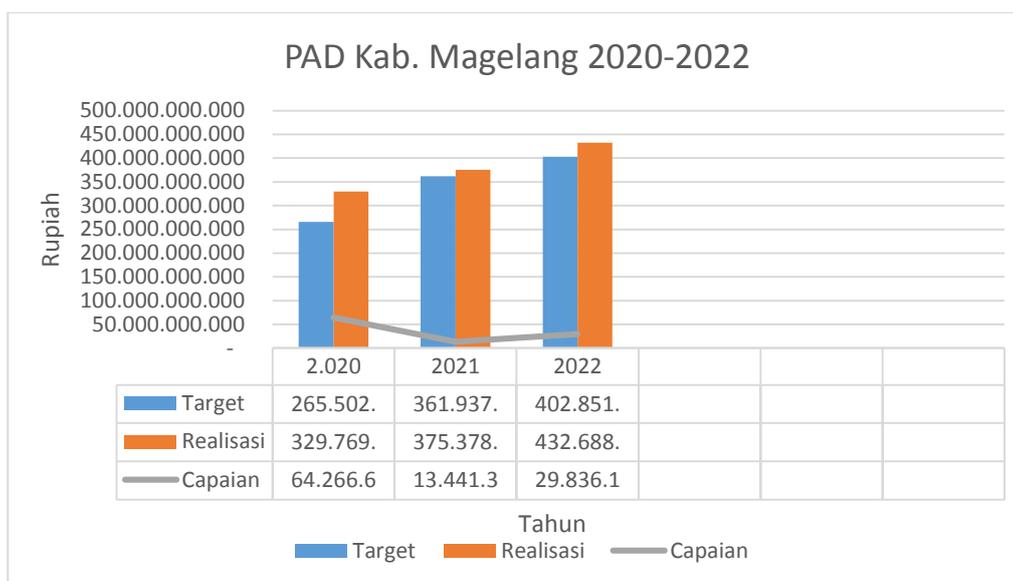
**Tabel 5 LRA Kabupaten Magelang 2022:**

Uraian	2022	
	Realisasi	Anggaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	432.688.035.341	402.851.931.662
Dana Perimbangan	1.481.150.169.461	1.516.022.793.217
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	644.185.972.288	648.215.679.000
Jumlah Pendapatan	2.558.024.177.090	2.567.090.403.879
Jumlah Belanja	1.570.326.001.677	2.864.668.786.188
Surplus/Defisit	- 12.301.824.587	- 297.578.382.309
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	328.578.382.309	328.578.382.309
Pengeluaran Pembiayaan	29.500.000.000	31.000.000.000
Pembiayaan Netto	299.078.382.309	297.578.382.309
SILPA	286.776.557.722	-

Sumber: (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

SILPA mencapai Rp286.776.557.722, yang diperoleh dari pendapatan asli daerah yang terealisasi melebihi rencana sebesar 107,41%, serta pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto yang sesuai dengan perencanaan mencapai 105%. Meskipun pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp297.578.382.309, realisasi mencapai Rp299.078.382.309 atau 100,50%.

**Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022:**



*Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022*

Berdasarkan dokumentasi Laporan Anggaran Kabupaten Magelang tahun 2020-2022, dapat dilihat bahwa terdapat target anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2020, target anggaran yang ditetapkan sebesar 2.020 miliar dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 265.502.524.500, mencapai capaian sebesar 329.769.193.224. Ini menunjukkan bahwa capaian anggaran pada tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 64.266.668.724. Pada tahun 2021, target anggaran yang ditetapkan sebesar 361.937.105.587, dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 375.378.465.373, mencapai capaian sebesar 13.441.359.786. Meskipun terdapat peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam target anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 402.851.931.662, dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 432.688.035.341, mencapai capaian sebesar 29.836.103.679. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun masih ada selisih antara target dan realisasi yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Magelang berhasil meningkatkan capaian anggarannya dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat beberapa selisih antara target dan realisasi yang perlu diperhatikan dan dievaluasi untuk perencanaan anggaran yang lebih efisien di masa mendatang.

**Gambar 2 Dana Perimbangan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022:**



*Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022*

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi Laporan Anggaran Kabupaten Magelang tahun 2020-2022, terlihat bahwa Kabupaten Magelang menerima dana perimbangan yang signifikan dari pemerintah pusat selama periode tersebut. Pada tahun 2020, dana perimbangan yang diterima mencapai 1.390.679.533.778, mengindikasikan sumber pendapatan yang penting bagi pembangunan dan operasional Kabupaten Magelang. Pada tahun 2021, jumlah dana perimbangan meningkat menjadi 1.406.424.109.695, menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dapat diartikan sebagai kepercayaan dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana yang efisien dan efektif di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2022, terlihat peningkatan yang lebih signifikan dalam jumlah dana perimbangan yang diterima, mencapai 1.481.150.169.461. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan dalam proyek-proyek pembangunan, pengelolaan keuangan yang baik, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2020-2022:**

Pengukuran kinerja adalah proses penting dalam dunia bisnis dan manajemen. Ini melibatkan analisis data untuk menilai pencapaian tujuan suatu organisasi, tim, atau individu. Tujuannya meliputi evaluasi pencapaian, identifikasi area perbaikan, basis keputusan yang cerdas, pengakuan prestasi, penilaian strategi, dorongan untuk inovasi, dan akuntabilitas organisasi. Dengan pemahaman kinerja yang baik, organisasi dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

#### **1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2020-2022:

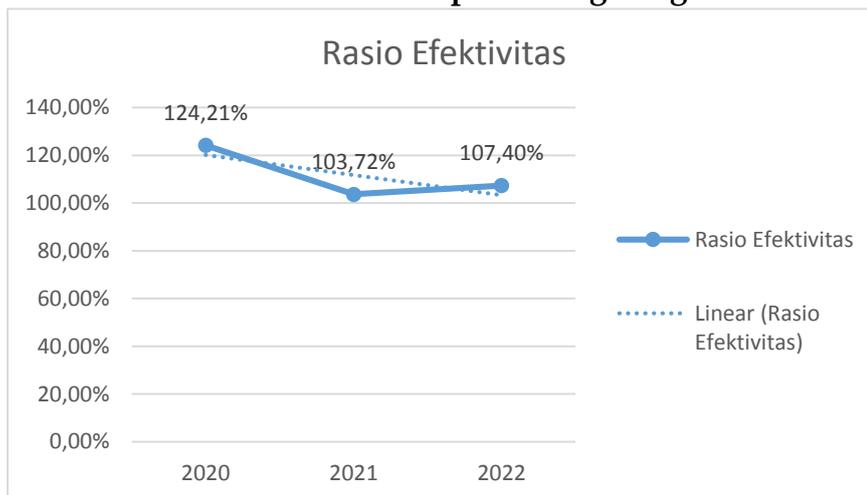
$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas 2020} &= \frac{\text{Rp } 329.769.193.224}{\text{Rp } 265.502.524.500} \times 100\% = 124,21\% \\ \text{Rasio Efektivitas 2021} &= \frac{\text{Rp } 375.378.465.373}{\text{Rp } 361.937.105.587} \times 100\% = 103,71\% \\ \text{Rasio Efektivitas 2022} &= \frac{\text{Rp } 432.688.035.341}{\text{Rp } 402.851.931.662} \times 100\% = 107,40\% \end{aligned}$$

**Tabel 6 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Kinerja:**

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2020	265.502.524.500	329.769.193.224	124,21%	Sangat Efektif
2021	361.937.105.587	375.378.465.373	103,71%	Sangat Efektif
2022	402.851.931.662	402.851.931.662	107,40%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

**Gambar 3 Rasio Efektivitas Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022:**



Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

Berdasarkan data LRA Kabupaten Magelang tahun 2020-2022, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efektif selama periode tersebut. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD mencapai 124,21%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan 24,21% lebih banyak pendapatan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan manajemen keuangan yang sangat baik dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Tahun 2021 juga menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efektif dengan rasio efektivitas PAD sebesar 103,71% rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu mengumpulkan pendapatan yang lebih tinggi dari target, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pada tahun 2022, rasio efektivitas PAD tetap tinggi, yaitu sebesar 107,40%, menunjukkan

konsistensi dalam mengelola pendapatan daerah. Meskipun realisasi PAD sama dengan anggaran yang telah ditetapkan, rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mempertahankan tingkat pendapatan yang sangat baik, mencerminkan kestabilan dan keberlanjutan kebijakan keuangan. Secara keseluruhan, tingkat rasio efektivitas PAD yang sangat baik selama periode tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal, menghasilkan dana yang cukup untuk mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Magelang.

## 2. Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2020-2022:

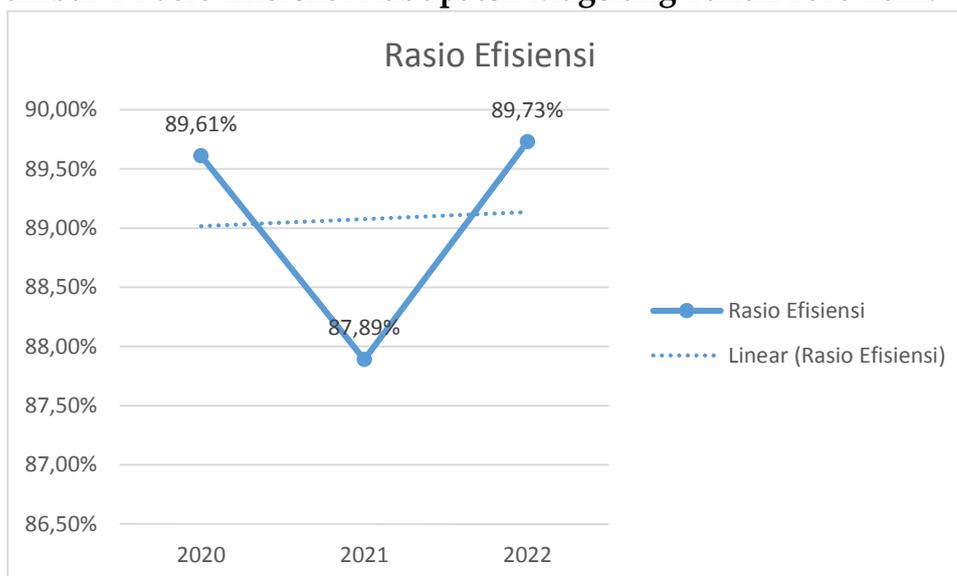
$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2020} &= \frac{\text{Rp } 2.304.375.917.161}{\text{Rp } 2.571.445.204.287} \times 100\% = 89,61\% \\ \text{Rasio Efisiensi 2021} &= \frac{\text{Rp } 2.413.163.788.892}{\text{Rp } 2.745.790.865.616} \times 100\% = 87,89\% \\ \text{Rasio Efisiensi 2022} &= \frac{\text{Rp } 2.570.326.001.677}{\text{Rp } 2.864.668.786.188} \times 100\% = 89,72\% \end{aligned}$$

**Tabel 7 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Kinerja:**

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2020	2.571.445.204.287	2.304.375.917.161	89,61%	Cukup Efisien
2021	2.745.790.865.616	2.413.163.788.892	87,89%	Cukup Efisien
2022	2.864.668.786.188	2.570.326.001.677	89,61%	Cukup Efisien

Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

**Gambar 4 Rasio Efisiensi Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022:**



Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

Berdasarkan data LRA Kabupaten Magelang tahun 2020-2022, terlihat rasio efisiensi PAD selama periode tersebut mengindikasikan kinerja keuangan yang cukup efisien.

tahun 2020, rasio efisiensi PAD sebesar 89,61%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan sekitar 89,61% dari target pendapatan yang telah ditetapkan. Meskipun tidak mencapai 100%, tingkat efisiensi memperlihatkan pemerintah daerah cukup efektif ketika mengelola sumber daya keuangan dan mendapatkan pendapatan yang signifikan. Tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik, dengan rasio efisiensi PAD masing-masing sekitar 87,89% dan 89,61%. Meskipun terdapat sedikit selisih antara target dan realisasi pendapatan, pemerintah daerah tetap mampu menjaga tingkat efisiensi yang stabil dalam mengelola sumber daya keuangan. Secara keseluruhan, meskipun rasio efisiensi PAD tidak mencapai 100% selama periode tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Magelang masih mampu mengumpulkan pendapatan yang cukup efisien dan efektif dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Evaluasi terus-menerus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi keuangan dapat membantu untuk terus meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.

### 3. Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2020-2022:

$$\text{Derajat Desentralisasi 2020} = \frac{\text{Rp } 329.769.193.224}{\text{Rp } 2.380.457.680.604} \times 100\% = 13,85\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi 2021} = \frac{\text{Rp } 375.378.465.373}{\text{Rp } 2.469.754.315.099} \times 100\% = 15,19\%$$

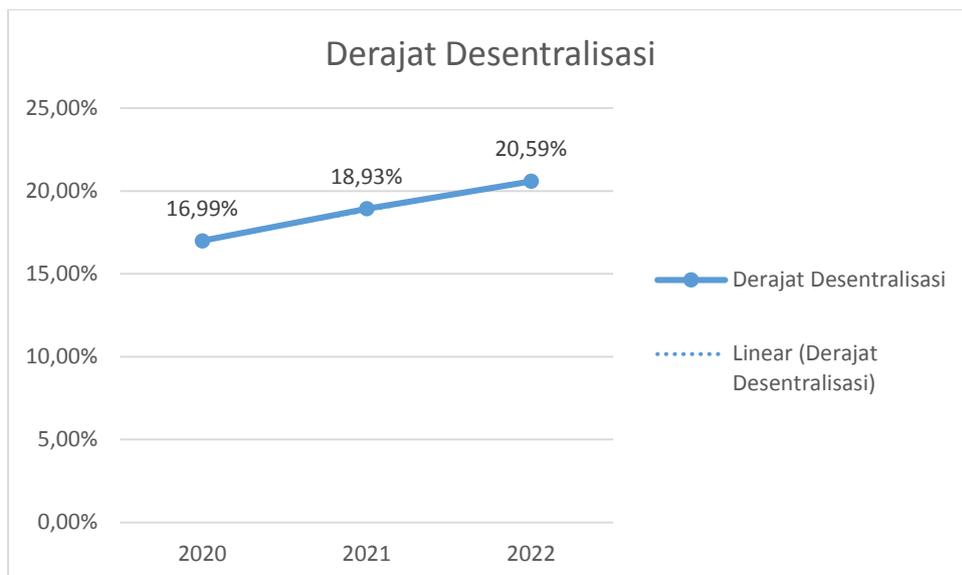
$$\text{Derajat Desentralisasi 2022} = \frac{\text{Rp } 432.688.035.341}{\text{Rp } 2.558.024.177.090} \times 100\% = 16,91\%$$

**Tabel 8 Tingkat Derajat Desentralisasi:**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan Total PAD	Rasio Derajat Desentralisasi	Keterangan
2020	329.769.193.224	2.380.457.680.604	13,85%	Kurang
2021	373.378.465.373	2.469.754.315.099	15,19%	Kurang
2022	432.688.035.341	2.558.024.177.090	16,91%	Kurang

Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

### Gambar 5 Derajat Desentralisasi Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022:



Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

Berdasarkan data LRA Kabupaten Magelang tahun 2020-2022, Rasio Derajat Desentralisasi memperlihatkan sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Selama periode tersebut, rasio tersebut termasuk tren yang meningkat, meskipun masih berada pada tingkat yang dianggap kurang memadai. Pada tahun 2020, rasio Derajat Desentralisasi sebesar 13,85%, menunjukkan bahwa PAD menyumbang hanya sekitar 13,85% dari total pendapatan daerah. Meskipun merupakan bagian dari pendapatan daerah, kontribusi ini dianggap kurang signifikan, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan lainnya. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan sedikit, dengan rasio sebesar 15,19%. Meskipun ada peningkatan, kontribusi PAD masih dianggap kurang memadai dalam mencakup total pendapatan daerah. Pada tahun 2022, rasio Derajat Desentralisasi meningkat menjadi 16,91%. Meskipun ada peningkatan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kontribusi PAD sehingga dapat menjadi bagian yang lebih substansial dari total pendapatan daerah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dalam rasio Derajat Desentralisasi dari tahun ke tahun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi PAD agar dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan bagi Kabupaten Magelang.

#### 4. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian tahun 2020-2022:

$$\text{Rasio Kemandirian 2020} = \frac{\text{Rp } 329.769.193.224}{\text{Rp } 1.940.323.473.805} \times 100\% = 16,99\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian 2021} = \frac{\text{Rp } 375.378.465.373}{\text{Rp } 1.982.641.210.547} \times 100\% = 18,93\%$$

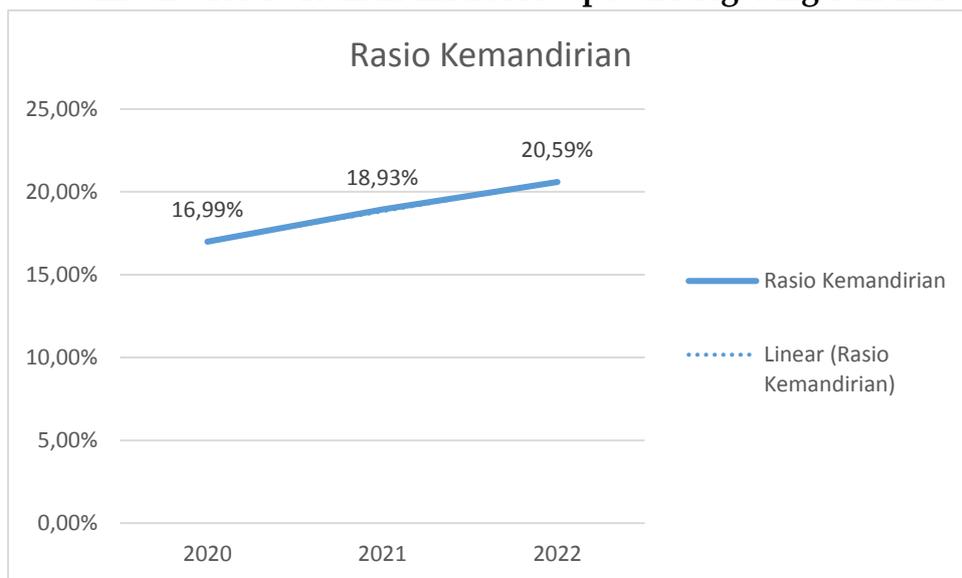
$$\text{Rasio Kemandirian 2022} = \frac{\text{Rp } 432.688.035.341}{\text{Rp } 2.100.710.656.495} \times 100\% = 20,59\%$$

**Tabel 9 Tingkat Rasio Kemandirian:**

Tahun	Rasio Kemandirian	Kriteria	Pola Hubungan
2020	16,99%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	18,93%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	20,59%	Rendah	Konsultif

Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

**Gambar 6 Rasio Kemandirian Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022:**



Sumber: Diolah oleh penulis dari LRA Kabupaten Magelang 2020-2022

Pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Magelang memperoleh kriteria Instruktif berdasarkan data rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Kriterianya. Instruktif menggambarkan situasi di mana kemampuan keuangan daerah berada pada tingkat rendah, dengan dominasi bantuan keuangan eksternal, dan menuju ke arah hubungan konsultatif. Rentang kategori kemandirian berada antara 0% hingga 25%. Sementara pada tahun 2022, berdasarkan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Kriterianya, Kabupaten Magelang mencapai kriteria Konsultif. Kriteria Konsultif mengindikasikan bahwa meskipun masih ada dominasi bantuan keuangan eksternal, kemampuan keuangan daerah masih rendah. Rentang kategori kemandirian berada antara 25% hingga 50%. Perhitungan rasio ketergantungan didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data Laporan Anggaran Kabupaten Magelang tahun 2020-2022, disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang cukup stabil dan perbaikan yang bertahap selama periode tersebut. Rasio efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam mengumpulkan pendapatan, dengan tingkat efisiensi yang cukup baik meskipun belum mencapai

100%. Meskipun demikian, ada peningkatan yang signifikan dalam rasio efektivitas PAD dari tahun 2020 hingga 2022, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan keuangan yang konsisten.

Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan kontribusi PAD sebagai bagian dari total pendapatan daerah. Meskipun rasio Derajat Desentralisasi mengalami peningkatan, kontribusi PAD masih dianggap kurang memadai, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan lainnya. Selain itu, meskipun mencapai kriteria konsultatif pada tahun 2022, Kabupaten Magelang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan eksternal.

Secara keseluruhan, sementara terdapat pencapaian positif dalam mengelola pendapatan dan menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan keuangan dan strategi pendapatan lokal dapat membantu pemerintah Kabupaten Magelang untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. R. (2017). *Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*. Politeknik Negeri Bandung.
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (n.d.). *Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s/d 2022*. <https://sibata.magelangkab.go.id/publik?m1=1>
- BPK RI. (2000). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- BPK RI. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Fitriani, N., L., P., & Dwirandra, A. A. N. . (2014). Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007- 2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8.1, 211–227.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Jati, B. P., & Pangestu, T. U. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 231–250.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Patarai, M. I. (2019). *Kinerja Keuangan Daerah*. De La Macca.